

# **KETERLAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PADA PROSES REKRUTMENT PENYELENGGARA PEMILU DI PROVINSI NTB**

Oleh

Irwan Budiana<sup>(1)</sup>, Agus Supinganto<sup>(2)</sup>, Dewi Nur Sukma Purqoti<sup>(3)</sup>

1. Dosen Keperawatan Poltekes Kemenkes Kupang
2. Dosen Keperawatan STIKES YARSI Mataram
3. Dosen Keperawatan STIKES YARSI Mataram

([budianairwan89@gmail.com](mailto:budianairwan89@gmail.com))

## **ABSTRAK**

Tingginya kasus anggota KPPS yang sakit dan meninggal dalam pemilu serentak tahun 2019 ini menjadi catatan bahwa pelaksanaan sistem penyelenggaraan pemilu serentak belum maksimal, khususnya yang berkaitan dengan rekrutment dan seleksi penyelenggara pemilu (Anggota KPPS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan anggota KPPS pada proses rekrutmen di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Non-eksperimen dengan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan suatu keadaan sebagaimana adanya. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan yakni menggunakan statistik deskriptif dengan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pemeriksaan kesehatan mayoritas responden berkategori baik (50.00%), sedangkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan mayoritas responden berkategori kurang (60.00%), evaluasi pemeriksaan kesehatan mayoritas responden berkategori baik (65.00%) dan keterlaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi anggota KPPS pada proses rekrutment mayoritas responden berkategori kurang (50.00%). Sebagai upaya mencegah kesakitan atau bahkan korban jiwa pada penyelenggara pemilu penting dibutkannya perencanaan yang komprehensif terkait dengan proses pemeriksaan kesehatan calon penyelenggara pemilu (KPPS) termasuk dengan *road map* standar pemeriksaan kesehatan (*Medical Check Up*) bagi penyelenggara pemilu.

**Kata Kunci:** Rekrutmen, Anggota KPPS, Pemeriksaan, Kesehatan.

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan umum atau yang biasa disingkat dengan istilah pemilu merupakan salah satu aspek dalam sistem demokrasi yang sangat penting diselenggarakan secara demokratis. Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari

2014 telah memberi banyak perubahan pada proses penyelenggaraan pemilu khususnya perubahan menjadi pemilihan umum serentak yang diselenggarakan pada tanggal 17 April tahun 2019. Pemilihan umum tersebut menjadi

pemilihan umum pertama yang dilaksanakan secara serentak dalam sejarah demokrasi Indonesia. Pemilu tersebut dilakukan untuk memilih secara langsung presiden dan wakil presiden, serta Anggota DPR pusat, DPD, DPRD Provinsi, dan Kabupaten atau Kota dan dilaksanakan dalam satu waktu dan pada dasarnya perubahan pola penyelenggaraan pemilu tersebut bertujuan untuk mewujudkan *good governance* di Indonesia, yaitu efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya penyatuan penyelenggaraan pemilu maka akan terjadi efektivitas dan efisiensi dalam segi kinerja, waktu, dan pembiayaan sehingga diharapkan mampu membatasi penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Pemilu serentak diharapkan mampu meminimalkan pembiayaan negara, meminimalisir biaya politik bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah (Solihah, 2019)

Pada pelaksanaannya perubahan pola penyelenggaraan pemilu tersebut justru menimbulkan banyak masalah terutama pada perubahan

beban kerja para penyelenggara pemilu khususnya anggota KPPS. Tahapan penyelenggara pemilu serentak tersebut telah melalui proses yang memakan waktu yang cukup panjang yang memperberat beban kerja anggota KPPS. Pada buku panduan KPPS Tahun 2019 yang dikeluarkan KPU disebutkan bahwa tugas KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pilih, serta memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas dalam memberikan hak pilihnya. Tahapan penyelenggaraan pemilu yang harus dilalui anggota KPPS mulai dari pemeriksaan alat kelengkapan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) beserta dokumen yang terdiri dari 5 (lima) lembar jenis suara dan diakhiri dengan proses perhitungan suara hasil pencoblosan di TPS yang rata-rata selesai pada pukul 01.00 – 03.00 Waktu Indonesia Bara (WIB) pada hari berikutnya. Belum lagi jika ada surat suara yang mengalami kerusakan dan surat suara yang dianggap tidak sah yang kesemua tahapan tersebut sangat

membebani kerja spara Anggota KPPS (Budi and Sendhikasari, 2019)

Penyelenggaraan pemilu serentak tersebut menjadi salah satu peyebab utama meningkatnya beban kerja para penyelenggara pemilu khususnya beban kerja para anggota Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS). Tingginya beban kerja tersebut yang menjadi penyebab utama banyak Anggota KPPS yang mengalami kelelahan usai bekerja selama 24 jam non-stop tanpa istirahat sehingga tidak sedikit dari anggota KPPS yang sakit dan meninggal dunia. Kasus meninggalnya anggota KPPS tersebut banyak disebabkan oleh kelelahan akibat beban kerja yang sangat tinggi yang anggota KPPS alami dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan data KPU per 24 April 2019, Anggota KPPS yang sakit berjumlah 883 orang sedaangkan anggota KPPS yang meninggal dunia berjumlah 144 orang yang tersebar di berbagai daerah di 34 provinsi. Namum dari data terakhir di KPU, yang tercatat sampai dengan tanggal 4 Mei 2019 pukul 16:00 WIB total Anggota KPPS yang sakit sebanyak 3.788 orang dan Anggota KPPS yang meninggal dunia sebanyak 440 orang (Purwanto,2019)

Menurut hasil investigasi

Kementerian Kesehatan di empat provinsi yang berbeda (Jakarta, Jawa Barat, Kepulauan Riau dan Sulawesi Tenggara) menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu yang meninggal dunia dari DKI Jakarta disebabkan oleh Infarct Myocard, Gagal Jantung, Koma Hepatikum, stroke, Respiratory Failure, dan Meningitis. Sedangkan di Jawa Barat disebabkan oleh Gagal Jantung, stroke, Respiratory Failure, Sepsis, dan Asma. Sementara di Kepulauan Riau meninggalnya petugas penyelenggara Pemilu disebabkan oleh gagal Jantung, kecelakaan, dan di Sulawesi Tenggara disebabkan oleh kecelakaan (Kemenkes, 2019)

Tingginya kasus anggota KPPS yang meninggal dunia dalam pemilu serentak pertama kali ini menjadi gambaran umum kualitas sistem penyelenggaraan pemilu, terutama yang berkaitan dengan proses rekrutment penyelenggara pemilu (anggota KPPS). Kondisi kesehatan yang tidak disipakan dengan baik akan diperburuk oleh beban kerja petugas yang sangat berat dalam menyelenggarakan pemilu serentak. Menurut study pendahuluan yang peneliti lakukan sebelumnya hampir

semua anggota KPPS yang peneliti wawancara di beberapa wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengemukakan bahwa pemilu kali ini merupakan yang paling melelahkan dan paling rumit, yang kegiatannya dimulai dari persiapan pembangunan TPS, proses pencoblosan sampai dengan perhitungan suara. Berdasarkan pengamatan langsung peneliti, proses perhitungan suara yang memakan waktu cukup lama adalah perhitungan untuk Anggota DPRD. Semua kegiatan itu hanya dilakukan oleh 7 (tujuh) Anggota KPPS, dan dari semua Anggota KPPS yang ada tidak semuanya dalam kondisi kesehatan yang prima dan tidak semua berusia muda. Kesehatan yang prima merupakan modal utama para anggota KPPS, kesehatan memberikan pengaruh langsung bagi kualitas dan kuantitas hasil kerja. Menurut penelitian (Piri, 2012) menyebutkan faktor kesehatan memberikan pengaruh signifikan terhadap keselamatan para pekerja, semakin meningkatnya nilai kesehatan pekerja maka akan menurunkan resiko terhadap ancaman keselamatan pekerja.

Tingginya kasus anggota KPPS yang sakit dan meninggal dalam menjalankan tugasnya tersebut hemat peneliti pada dasarnya bisa dihindari atau diminimalisir jika saja proses rekrutment, seleksi dan penempatan penyelenggara pemilu lebih mengedepankan kesehatan para kandidat sebelum ditetapkan atau menjalankan tugas, baik kesehatan secara fisik (biologi), kesehatan psikologi, kesehatan sosial termasuk kesehatan secara spiritual. Pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) nomor 36 tahun 2018 tentang perubahan peraturan KPU nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan (PKK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dalam penyelenggaraan pemilihan umum pasal 36 tentang syarat menjadi PKK, PPS dan KPPS menyebutkan bahwa para kandidat harus mampu atau sehat secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotik (KPU 2018).

Pada peraturan tersebut tidak disebutkan upaya pencegahan terhadap memburuknya kesehatan

kandidat dengan kesehatan resiko tinggi, misalnya melalui surat keterangan lulus pemeriksaan kesehatan lengkap dari pelayanan kesehatan sehingga para kandidat penyelenggara pemilu memenuhi syarat kesehatan yang paripurna. Meskipun demikian, beberapa KPU kabupaten dan kota (KPU, 2019) mempersyaratkan surat keterangan mampu jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit setempat menjadi salah satu dokumen yang harus dilengkapi para peserta rekrutmen anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) namun hemat peneliti yang mengetahui dengan sangat persis penatalaksanaan pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani terutama di daerah pedesaan masih jauh dari yang diharapkan jika dibandingkan dengan beban kerja para anggota KPPS.

Sebagai faktor sentral dan strategis dalam suksesnya penyelenggaraan pemilu seleksi kesehatan berstandar nasional bagi anggota KPPS sudah seharusnya dijadikan prioritas, terutama pada proses rekrutmet, seleksi dan penempana. Hal tersebut menjadi

awal tercipta dan terbentuknya penyelenggara pemilu yang handal dan mumpuni serta berkompeten. Jika sistem rekrutmen penyelenggara pemilu tersebut mengedepankan keselamatan penyelenggara maka proses seleksi yang dilakukan pun akan dilaksanakan sesuai dengan standar kesehatan atau metode yang sudah ditentukan sebelumnya untuk menjaring calon penyelenggara pemilu yang bukan hanya berkompeten dan mampu untuk melaksanakan tugas dengan baik dan benar, namun penyelenggara pemilu yang mampu bertahan pada medan atau kondisi sulit sekalipun seperti beban kerja yang berlebihan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang keterlaksanaan pemeriksaan kesehatan anggota KPPS pada proses rekrutment penyelenggara pemilu serentak tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keterlaksanaan program pemeriksaan atau tes kesehatan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada proses rekrutmen di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian Non-eksperimen dengan design deskriptif kuantitatif dan pendekatan survey. Pendekatan tersebut digunakan untuk menggambarkan keadaan sebenarnya tentang keterlaksanaan program pemeriksaan kesehatan anggota KPPS pada proses rekrutmen penyelenggara pemilu serentak tahun 2019. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pemilihan umum tahun 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kriteria sampel yakni, menjadi anggota atau ketua KPPS, mampu membaca dengan baik dan bersedia menjadi responden penelitian. Sedangkan teknik pengambilan sampling menggunakan pendekatan *probability sampling* dengan pendekatan *simple random sampling* dimana anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sample penelitian (Hamdhana and Iqbal, 2018).

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebuah kuesioner atau biasa juga disebut angket yang disusun untuk mengetahui keterlaksanaan pemeriksaan

kesehatan pada proses rekrutment penyelenggara pemilu khususnya perekrutan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sedangkan analisis data yang digunakan meliputi analisis univariat untuk mengetahui keterlaksanaan pemeriksaan kesehatan pada proses rekrutment penyelenggara pemilu serentak tahun 2019 (Perekrutan Anggota KPPS), kemudian setelah data tersebut terkumpul akan diditabulasi dan dipersentasikan. Sedangkan untuk mengetahui kriteria responden dalam penskoran data tiap faktor maka dilakukan pengkategorian yakni kategori baik (76%-100%), kategori cukup (56%-75%) dan kategori kurang (< 56%).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Karakteristik Responden**

Karakteristik responden yang ikut serta dalam penelitian ini meliputi: Umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, status perkawinan, pekerjaan, pendapatan, keluhan kesehatan atau penyakit sebelum bertugas sebagai KPPS, kepemilikan asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan) dan riwayat penyakit terdahulu.

a. Karakteristik responden penelitian berdasarkan umur

**Tabel 1 Distribusi responden berdasarkan tingkat usia.**

Status Kepegawaian	F	%
<20 Tahu	1	05
20 s.d 40 Tahun	14	70
> 40 Tahun	5	25
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan bahwa mayoritas usia responden berada pada usia 20-40 tahun yakni berjumlah 14 orang (70%). Mayoritas umur responden tersebut berada dalam kondisi kemampuan intelektual yang optimal untuk melaksanakan sebuah kegiatan. Menurut hasil penelitian koordinasi kelompok kerja pemilu UGM anggota KPPS yang meninggal dunia berada pada rentang usia 50 sampai dengan 70 tahun dan 39% meninggal setelah sampai atau setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sedangkan menurut hasil penelitian (Atiqoh 2014) terdapat hubungan antara usia dengan kelelahan kerja pada pekerja Konveksi Bagian Penjahitan di CV. Aneka Garment Gunungpati Semarang. Sedangkan menurut penelitian (Harmiyati 2016) menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara

umur dengan kinerja dengan hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai *p value* = 0.624 (>0,05).

b. Karakteristik responden penelitian berdasarkan jenis kelamin

**Tabel 1 Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin.**

Jenis Kelamin	F	%
Laki-laki	17	85
Perempuan	3	15
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki yaitu sejumlah 17 orang (85%). Menurut penelitian (Sapariah 2015) menunjukkan bahwa jenis kelamin berpengaruh terhadap kinerja. Hal tersebut didapatkan setelah dilakukannya uji *chi kuadrat* dengan uji independen antara dua faktor diperoleh nilai  $\chi^2$  hitung lebih besar dari  $\chi^2$  gambar yaitu  $21,65 > 3,84$ .

Scheidegger, Amy L. Ridley Meyers, and Karen Friedlen, dalam penelitian (Albrecht and Jones 2009) mengemukakan bahwa : *“Males were more satisfied and confident and had fewer difficulties than females, The process of adjustment appears to be gradual.”* Artinya pria lebih mudah puas dan percaya diri serta memiliki

kesulitan lebih sedikit dibanding perempuan. Sedangkan Nasaruddin Umar dalam (Janah 2017) gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial dan budaya dan hasil penelitian (Harmiyati 2016) menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan kinerja seseorang.

Pada umumnya secara fisik dan tenaga laki-laki jauh lebih kuat bertahan dalam situasi kerja yang memiliki beban kerja lebih berat. Sehingga tidak jarang di beberapa daerah insentif laki-laki berbeda dengan perempuan, kecuali pada situasi kerja tidak membutuhkan energi lebih tinggi, seperti di perkantoran, sekolah ataupun di pelayanan publik lainnya seperti di kantor-kantor milik pemerintah.

c. Karakteristik responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan

**Tabel 3 Distribusi responden berdasarkan pendidikan.**

<b>Pendidikan</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Tidak sekolah	0	0
SD	0	0
SMP	0	0
SMA	6	30
PT	14	70
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 3 di atas distribusi responden berdasar tingkat pendidikan terakhir menunjukkan sebagian besar responden memiliki pendidikan akhir pada Perguruan Tinggi (PT) yaitu sejumlah 14 orang (70%). Hal tersebut dapat disebabkan karena minimnya kepesertaan masyarakat dengan pendidikan akhir dibawah PT yang mengikuti proses rekrutmen menjadi KPPS.

Menurut hasil penelitian (Wirawan 2016) Ada pengaruh positif dari tingkat pendidikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan penelitian (Amperaningsih 2013) menyebutkan tidak ada hubungan antara pendidikan responden dengan pelaksanaan Perkesmas dengan hasil uji statistik bahwa nilai *p Value* yang diperoleh 0,436 ( $> \alpha 0,05$ ). Begitu juga penelitian yang dilakukan (Harmiyati 2016) menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan kinerja perawat perkesmas di puskesmas kota Palembang (*p value* = 0.627). Selain itu, menurut (Esteslita 2011), mengemukakan bahwa pendidikan tidak berkorelasi dengan kinerja paramedis dengan nilai *p Value* 0,4110. Tingkat pendidikan formal menunjukkan

tingkat intelektual atau tingkat pengetahuan seseorang. Hal ini dapat di pahami bahwa dengan pendidikan yang lebih tinggi seseorang mempunyai kesempatan yang lebih banyak mendapatkan informasi dan ia lebih terlatih untuk mengelola, memahami, mengevaluasi, mengingat dan kemudian menjadi pengetahuan yang di milikinya.

Latar belakang pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi persepsi, cara pandang dan sikapnya dalam melihat sesuatu pekerjaan atau permasalahan yang di hadapinya, demikian pula terhadap kepuasan kerja sehingga dapat di asumsikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh seseorang maka akan semakin berbeda persepsinya dalam menyikapi masalah.

Latar belakang pendidikan merupakan salah satu faktor yang mendukung baik tidaknya kualitas kerja seseorang. Umumnya orang yang mempunyai pendidikan lebih tinggi akan mempunyai wawasan yang lebih luas terutama penghayatan akan arti pentingnya produktivitas. Tingginya kesadaran akan pentingnya produktivitas dapat

mendorong pegawai melakukan tindakan yang produktif. Pendidikan yang tinggi juga akan mendorong seseorang untuk lebih kreatif.

d. Karakteristik responden penelitian berdasarkan status perkawinan

**Tabel 4 Distribusi responden berdasarkan status perkawinan.**

Status Perkawinan	F	%
Menikah	15	75
Belum menikah	5	25
Janda	0	0
Duda	0	0
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 4 diatas distribusi responden berdasarkan status pernikahan mayoritas responden sudah menikah dengan jumlah responden yakni 15 orang atau (75%). Minimnya jumlah responden menikah disebabkan oleh beberapa alasan salah satunya responden belum merasa siap atau merasa mandiri secara finansial atau ekonomi. Menurut hasil penelitian (Harmiyati 2016) menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara status pernikahan dengan kinerja perawat perkesmas di Puskesmas dengan hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai  $p\ value = 0.964 (>0,05)$ .

Sedangkan menurut (Gerald 2016) mengemukakan hasil uji korelasi menunjukkan status pernikahan dengan motivasi kerja karyawan memiliki hubungan yang kuat sebesar 0.617. Hasil uji koefisien determinasi status pernikahan memberikan kontribusi pada motivasi kerja karyawan sebesar 38,06%, sisanya sebesar 61,94% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak terukur sehingga hasil uji hipotesis nilai hitung t lebih besar dari gambar t ( $7.76 > 1,660$ ), artinya Status pernikahan berpengaruh positif terhadap motivasi karyawan sehingga bisa dikatakan bawah pernikahan akan membuat anggota KPPS lebih bertanggungjawab.

e. Karakteristik responden penelitian berdasarkan jenis pekerjaan

**Tabel 5 Distribusi responden berdasarkan pekerjaan.**

Pekerjaan	F	%
PNS	4	20
Swasta	7	35
Wiraswata	2	10
Tani	0	0
lainnya	7	35
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 5 di atas Distribusi responden berdasarkan pekerjaan menunjukkan sebagian

besar responden bekerja di swasta dengan berbagai profesi lainnya yaitu sama-sama sejumlah 7 orang (35%). Menurut penelitian (Harmiyati 2016) (2016) terdapat hubungan yang signifikan antara jenis pekerjaan dengan kinerja perawat Perkesmas di Puskesmas kota Palembang dengan hasil uji statistik menunjukkan bahwa ( $p \text{ value} = 0.012$ ). Sedangkan menurut (Amperaningsih 2013) terdapat hubungan yang bermakna antara lama kerja perawat dengan pelaksanaan program Perkesmas dengan hasil uji statistik diperoleh nilai p Value 0.027 ( $< \alpha 0,05$ ).

Pada dasarnya jenis pekerjaan dapat dikaitkan dengan pengalaman pekerja yang berbeda-beda. Hal ini mendukung teori sebelumnya yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja individu adalah pengalaman, apabila pengalaman individu makin banyak maka akan semakin tinggi pula kinerjanya. Teori sebelumnya bahwa perilaku individu terhadap kinerja dipengaruhi oleh kemampuan, keterampilan dan pengalaman seseorang.

Lama Kerja seseorang juga ikut menentukan kinerja seseorang, karena semakin lama dan banyak

pengalaman seseorang maka akan semakin banyak pula keterampilan yang pernah di ketahui dan akan memberikan rasa percaya diri, mempunyai sikap ketika menghadapi pekerjaan atau persoalan, sehingga kualitas kinerja akan menjadi lebih baik. Menurut Nuryati (2016) T- hitung variabel status pegawai t- hitung lebih kecil dari t-gambar ( $1,697 < 2,021$ ) dengan probabilitas (0,096) lebih besar dari taraf signifikan 0,05 dengan demikian  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya variabel status pegawai tidak mempunyai pengaruh positif atau tidak signifikan terhadap kinerja pegawai.

Sedangkan, menurut (Sholihah, 2013) tidak ada hubungan antara kinerja dan status kepegawaian atau sama saja dan tidak ada perbedaan dengan nilai t absolut sebesar 0,8 (jauh di bawah nilai 2), dan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,75 ( $> 0,05$ ) dikatakan signifikan bila nilai sig  $< 0,05$  dan menurut (Atiqoh 2014) ada hubungan antara masa kerja dengan kelelahan kerja pada pekerja.

f. Karakteristik responden berdasarkan pendapatan

**Tabel 6 Distribusi responden berdasarkan pendapatan.**

Pendapatan	F	%
< 1 Juta	8	42
1 s.d 3 Juta	5	26
>3 Juta	6	31
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 6 di atas distribusi responden berdasarkan pendapatan mayoritas responden berpendapatan < Rp. 1.000.000 yang berjumlah 8 orang atau (42%). Menurut penelitian (Riyadi 2011) menunjukkan bahwa kompensasi finansial tidak berpengaruh terhadap motivasi kerja maupun kinerja karyawan, hal ini dapat terjadi kemungkinan disebabkan karena responden yang dipilih para manajer yang berada di tingkat menengah, dalam kondisi seperti ini harapan dari masing-masing responden bukan semata-mata kompensasi finansial yang dituju melainkan kompensasi non finansialpun dapat menjadi pertimbangan dan menentukan kualitas kerja karyawan. Jika persepsi karyawan terhadap imbalan yang diterimanya tidak memadai, maka kemungkinan karyawan tersebut akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar atau mengurangi intensitas usahanya.

g. Karakteristik responden penelitian berdasarkan keluhan sebelum bertugas

**Tabel 7 Distribusi responden berdasarkan keluhan sebelum bertugas.**

Keluhan	F	%
Ada keluhan	0	0
Tidak ada keluhan	20	100
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 7 di atas distribusi responden berdasarkan ada tidaknya penyakit anggota KPPS sebelum tes atau sebelum bertugas berjumlah 20 orang (100%). Kualitas kesehatan calon anggota KPPS sangat penting dilakukan identifikasi untuk memastikan organisasi penyelenggara pemilu (KPU) mendapatkan anggota KPPS yang benar-benar sehat dan siap bertugas dalam situasi apapun untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019. Hal ini sangatlah penting dilakukan karena saat KPU menerima seseorang menjadi anggota KPPS maka KPU semestinya bertanggung jawab terhadap kesehatan anggota KPPS tersebut selama melakukan pekerjaan (UU No. 1/1970 yang berisi perusahaan wajib untuk memberikan perlindungan untuk keselamatan

dan kesehatan bagi Karyawan yang ada di perusahaannya).

h. Karakteristik responden penelitian berdasarkan kepesertaan BPJS kesehatan

**Tabel 8 Distribusi responden berdasarkan kepesertaan BPJS Kesehatan.**

Kepesertaan BPJS	F	%
Peserta	14	70
Bukan Peserta	06	30
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 8 di atas distribusi responden berdasarkan kepesertaan BPJS Kesehatan mayoritas menjadi anggota BPJS Kesehatan yakni berjumlah 14 orang (70%). Sulitnya akses dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang umumnya dipengaruhi oleh faktor finansial. Masyarakat yang menderita penyakit tergolong berat tidak dapat disembuhkan karena ketiadaan biaya pengobatan sehingga pada akhirnya lambat ditangani atau tidak ditangani sama sekali sehingga pada akhirnya penyakitnya semakin parah bahkan mengakibatkan kematian (Putri 2014)

i. Karakteristik responden penelitian berdasarkan kepemilikan riwayat penyakit.

**Tabel 9 Distribusi responden berdasarkan riwayat penyakit**

Riwayat Penyakit	F	%
------------------	---	---

Ada riwayat	05	25
Tidak ada riwayat	15	75
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 9 diatas distribusi responden berdasarkan kepemilikan riwayat penyakit mayoritas tidak memiliki riwayat penyakit 15 orang atau (75%). Adanya keterangan dari calon anggota KPPS tentang riwayat penyakit pribadi atau riwayat penyakit keluarga sangat penting untuk diidentifikasi untuk mengantisipasi atau mencegah penderita lebih rentan atau lebih sensitif terhadap pajanan yang dialami (Andhika 2016)

## 2. Data Inti Penelitian

Data inti penelitian mencakup beberapa aspek yakni aspek perencanaan, pelaksanaan perencanaan, proses evaluasi dan keterlaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan atau tes kesehatan pada proses rekrutment calon anggota KPPS pemilu serentak tahun 2019.

a. Perencanaan Pemeriksaan atau Tes Kesehatan Calon Anggota KPPS

**Tabel 10 Distribusi responden berdasarkan perencanaan**

### **pemeriksaan atau tes kesehatan calon anggota KPPS**

<b>Perencanaan</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Baik	10	50
Cukup	08	40
Kurang	02	10
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 10 diatas distribusi responden berdasarkan perencanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan calon anggotaa KPPS pemilu serentak tahun 2019 mayoritas berkategori baik (50%). Perencanaan SDM pada dasarnya merupakan pemilihan kebijakan dan strategi mengenai tenaga kerja serta analisis kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga mampu mengantisipasi baik kekurangan maupun kelebihan sumber daya manusia demi tercapainya organisasi secara efektif dan efisien (Adawiyah 2013).

Menurut hasil penelitian pada proses perencanaan terdapat 75% responden mengungkapkan KPU mengeluarkan surat Keputusan (SK), surat tugas, atau sejenisnya tentang kewajiban calon anggota KPPS melaksanakan pemeriksaan atau tes kesehatan pada proses rekrutment calon anggota KPPS, 55% mengungkapkan KPU tidak

mengorganisir anggota KPPS dalam melakukan kegiatan pemeriksaan atau tes kesehatan pada proses rekrutment anggota KPPS. Artinya para calon anggota KPPS melakukan pemeriksaan kesehatan secara mandiri berdasarkan inisiatif sendiri. 65% mengatakan KPU melakukan penyusunan jadwal dan melakukan sosialisasikan jadwal pelaksanaan pemeriksaan atau tes kesehatan pada proses rekrutment calon anggota KPPS. 55% mengungkapkan KPU mendatangkan atau melakukan kerja sama dengan pelayanan kesehatan untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan pada proses rekrutment calon anggota KPPS dan 70% mengatakan kelulusan pemeriksaan atau tes kesehatan menjadi syarat utama kelulusan menjadi anggota KPPS.

Perencanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon anggota KPPS bertujuan untuk mengetahui gambaran menyeluruh tentang kondisi kesehatan calon KPPS. Tidak hanya kondisi saat ini namun juga termasuk dengan riwayat penyakit terdahulu dan riwayat penyakit keluarga. Merujuk pendapat Schuler (1987) dalam (Adawiyah 2013) dapat disimpulkan bahwa tahapan penting

dalam proses perencanaan SDM salah satunya yaitu Gathering, Analyzing, and Forecasting Supply and Demand Data. Pada tahap ini dilakukan sejumlah aktivitas untuk mengumpulkan, menginvestigasi, menganalisis, dan memprediksi kebutuhan data untuk menetapkan supply dan demand. Sumber data bisa berasal dari lingkungan internal maupun eksternal, yang dikaji atau gali berdasarkan pengalaman pada masa lalu, pengamatan pada masa kini, dan prediksi kebutuhan masa depan.

Adanya pemeriksaan atau tes kesehatan yang komprehensif pada calon anggota KPPS akan memudahkan KPU dalam mendapatkan informasi tentang kesehatan calon Anggota KPPS yang bersumber langsung dari calon anggota KPPS. Berdasarkan informasi awal tentang kesehatan calon anggota KPPS tersebut KPU dapat melakukan tindakan pencegahan untuk meminimalisir terjadinya angka kesakitan atau bahkan terjadinya korban jiwa dari anggota KPPS yang disebabkan oleh riwayat penyakit kardiovaskuler yakni 51% (UGM, 2019)

b. Pelaksanaan Pemeriksaan atau Tes Kesehatan Calon Anggota KPPS

**Tabel 11 Distribusi responden berdasarkan pelaksanaan pemeriksaan atau tes kesehatan calon anggota KPPS**

<b>Pelaksanaan</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Baik	01	05
Cukup	07	35
Kurang	12	60
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 11 di atas distribusi responden berdasarkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon anggota KPPS mayoritas berkategori kurang (60%). Pada proses pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon anggota KPPS terdapat beberapa point penting untuk dilaksanakan sebagai upaya pencegahan memburuknya kondisi anggota KPPS saat bertugas, Diantara kegiatan pemeriksaan kesehatan yang penting dilakukan pada proses rekrument anggota KPPS yakni pemeriksaan fisik lengkap (*head to toe*), pemeriksaan laboratorium, dan pemriksaan lainnya.

Menurut hasil penelitian ini 75% mengatakan petugas kesehatan tidak melakukan pemeriksaan fisik yang lengkap yakni mulai dari ujung rambut smapai ujung kepala (*Head to*

*toe*). Pemeriksaan fisik yang dilakukan hanya sekedar mengobservasi tanpa menerapkan pendekatan PPA (Perkusi atau dengan ketukan, Palpasi atau meraba dan Auskusltasi atau mendengarkan) dengan konfrehensif. Pemeriksaan yang tidak menyeluruh tentu akan menyebabkan minimnya informasi tentang kesehatan seseorang dan akan berdanpak pada penentuan diagnosa dan penatalaksanaan selanjutnya, (55%). responden mengatakan bahwa petugas kesehatan tidak melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital (Penafasan, nadi, tekanan darah dan suhu), artinya calon anggota KPPS hanya menerima surat keterangan tanpa dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital (TTV), adapun responden yang mendaptkan pemeriksaan TTV mengaku hanya mendaptkan pemeriksaan tekanan darah tanpa diikuti pemeriksaan lainnya. Sedangkan petugas kesehatan yang tidak melakukan pemeriksaan radiologi menggunakan sinar X atau sinar radioaktif mencapai 95%. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemeriksaan kesehatan yang didapatkan anggota KPPS sebelum bertugas masih jauh dari stadar yang

sudah di tetapkan, sehingga tindakan preventif sulit dilakukan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 75% responden mengatakan bahwa petugas kesehatan tidak melakukan pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan hemotologi (darah) pemeriksaan urin dan 85% responden mengatakan petugas kesehatan tidak melakukan pemeriksaan fungsi paru, kolestrol, asam urat dan gula darah. Minimnya jenis pemeriksaan tersebut erat kaitannya dengan permintaan pasien sendiri dan jenis pemeriksaan yang dibutuhkan pasien. Begitupun dari KPU tidak yang tidak menuntut adanya pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, jadi bukan karena ketidakpatuhan petugas kesehatan.

### c. Evaluasi Pemeriksaan atau Tes Kesehatan Calon Anggota KPPS

**Tabel 12 Distribusi responden berdasarkan evaluasi pemeriksaan atau tes kesehatan calon anggota KPPS**

<b>Evaluasi</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Baik	10	50
Cukup	3	15
Kurang	7	36
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan tabel 12 di atas distribusi responden berdasarkan evaluasi pemeriksaan kesehatan

pada rekrutment calon anggota KPPS mayoritas berkategori baik (50%). Pada proses evaluasi proses pemeriksaan kesehatan calon anggota KPPS terdapat beberapa hal yang harus di lakukan seperti melakukan analisis hasil pemeriksaan, melaporkan hasil dan lain sebagainya. Menurut hasil penelitian petugas kesehatan yang memberikan pendidikan kesehatan terhadap hasil pemeriksaan kesehatan Calon Anggota KPPS hanya 55%, sedangkan petugas kesehatan yang memberikan pelaporan tertulis terhadap hasil pemeriksaan atau tes kesehatan kepada calon Anggota KPPS hanya 55%. Sedangkan menurut 60% responden KPU tidak mengumumkan secara tertulis atau menetapkan kelulusan pemeriksaan kesehatan calon Anggota KPPS. KPU semestinya melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pemeriksaan atau tes kesehatan sebagai syarat utama rekrutmen anggota KPPS, namun hanya 55% reponden yang mengatakan KPU melakukan evaluasi. Sedangkan menurut 50% responden KPU tidak melaporkan kegiatan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat utama rekrutmen

anggota KPPS. Menurut Notoatmodjo (2009) dalam (Rengganis 2013), di institusi manapun juga, sebelum mengangkat karyawan pada umumnya melakukan berbagai macam tes, termasuk tes kesehatan. Bahkan pada saat melamar, calon karyawan harus melampirkan surat keterangan kesehatan dari.

d. Keterlaksanaan Pemeriksaan atau Tes Kesehatan (*Medical Check Up*) Calon Anggota KPPS

**Tabel 13 Distribusi responden berdasarkan keterlaksanaan pemeriksaan atau tes kesehatan (MCU) calon anggota KPPS**

Keterlaksanaan MCU	F	%
Baik	03	05
Cukup	07	45
Kurang	10	50
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer 2019

Berdasarkan Tabel 13 di atas distribusi responden berdasarkan keterlaksanaan pemeriksaan kesehatan (*Medical Check Up*) calon anggota KPPS mayoritas berkategori kurang (50%). Tujuan utama pemeriksaan kesehatan sebelum kerja ini di samping berguna bagi institusi, juga bermanfaat bagi calon staf. Bagi institusi, jelas akan memperoleh karyawan yang sehat dan sudah barang tentu secara fisik mampu menjalankan tugas atau pekerjaan yang akan dibebankan. Di

samping itu, perusahaan atau institusi tersebut terhindar dari penyebaran penyakit, apabila calon yang diterima sebagai karyawan tersebut ternyata menderita suatu penyakit menular. Sedangkan bagi calon staf yang bersangkutan dapat mengetahui status kesehatannya, dan melakukan upaya mengatasi masalah kesehatannya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan pemeriksaan kesehatan mayoritas responden berkategori baik (50.00%)
2. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan mayoritas responden berkategori kurang (60.00%).
3. Kegiatan evaluasi pemeriksaan kesehatan mayoritas responden berkategori baik (65.00%).
4. Keterlaksanaan pemeriksaan kesehatan (*Medical Check Up*) bagi anggota KPPS pada proses rekrutment mayoritas responden berkategori kurang (50.00%).

## REKOMENDASI

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Membuat perencanaan yang komprehensif terkait dengan proses pemeriksaan kesehatan calon penyelenggara pemilu (KPPS) hal tersebut penting dilakukan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggara pemilu.
2. Membuat *road map* standar pemeriksaan kesehatan (*Medical Check Up*) bagi penyelenggara pemilu.
3. Memperkuat kerja sama lintas sektoral khususnya dengan pelayanan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan.

## REFERENSI

Adawiyah, Wildanur. 2013. "Analisis Beban Kerja Sumber Daya Manusia Dalam Aktivitas Produksi Komoditi Sayuran Selada ( Studi Kasus : CV Spirit Wira Utama )." IV(2): 128–43. <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jmo/article/view/12619/96>.

Albrecht, Annette C, and Dennis G Jones. 2009. "Web-Based Research Tools and Techniques." 2009: 337–47. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.560.5096&rep=rep1&>

Amperaningsih, Yuliaty Dkk. 2013. "Kinerja Perawat Dalam Pelaksanaan Perkesmas." *Jurnal Kesehatan Politkenik Tanjung Karang* 4(1): 204–13. <http://ejurnal.poltekkes-tjk.ac.id/index.php/JK/article/view/1/1>.

Andhika, Putri. 2016. "Perbandingan tingkat kinerja keselamatan dan kesehatan kerja sebelum dan sesudah penerapan ohsas 18001 di pt. phapros, tbk." *Diponegoro University Institutional Repository*. <http://eprints.undip.ac.id/47990/>.

Atiqoh, Januar Dkk. 2014. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kelelahan Kerja Pada Pekerja Konveksi Bagian Penjahitan Di CV . Aneka Garment Gunungpati Semarang." *jurnal kesehatan masyarakat (e-Journal)* 2(2). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/6386/6164>.

Budi, Sidiq, and Dewi Sendhikasari. 2019. "Jaminan pemerintah terhadap anggota kpps dalam pemilu serentak 2019." *Info Singkat* XI: 25.

- [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info\\_Singkat-XI-9-I-P3DI-Mei-2019-2081.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XI-9-I-P3DI-Mei-2019-2081.pdf).
- Esteslita. 2011. "Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Kinerja Paramedis Di RSUD Ahmad Yani Metro."
- Geraldi. 2016. "pengaruh status pernikahan terhadap motivasi kerja karyawan di yogya center bandung." Universitas Widyatma. <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4633/Cover.pdf?sequence=1>.
- Hamdhana, Defry, and Muhammad Iqbal. 2018. "Aplikasi quick count pilkada dengan menggunakan metode random." *e-Journal TECHSI* 10(1): 141-54. <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/techsi/article/view/622>.
- Harmiyati, Lela. 2016. "Pengaruh Karakteristik Dan Kapabilitas Individu Serta Karakteristik Organisasi Terhadap Persepsi Kinerja Perawat Perkesmas Ditetapkan Sebagai Upaya Pengembangan Di Terhadap Keluarga Rawan Kes." *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan* 3(1): 341-49. <https://media.neliti.com/media>
- Janah, Nasitotul. 2017. "telaah buku argumentasi kesetaraan gender perspektif al-qur ' an karya nasaruddin umaR." *SAWWA* 12(April):
- Kemenkes. 2019. *Hasil Investigasi Meninggalnya Petugas Pemilu Dari 4 Provinsi*.
- KPU. 2018. "Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peratuan KPU Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (." : 1-17. [https://jdih.kpu.go.id/data/dat\\_a\\_pkpu/PKPU 36 THN 2018.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/dat_a_pkpu/PKPU_36_THN_2018.pdf).
- KPU, Jepara. 2019. "Pengumuman-Daftar-Calon-Anggota-KPPS.Pdf." : 1-3. [https://www.kpujepara.go.id/wp-content/uploads/2019/02/104. Pengumuman-Daftar-Calon -anggota-KPPS.pdf](https://www.kpujepara.go.id/wp-content/uploads/2019/02/104.Pengumuman-Daftar-Calon-anggota-KPPS.pdf).
- Piri, Sovian. 2012. "Pengaruh Kesehatan, Pelatihan Dan Penggunaan Alat Pelindung Diri

- Terhadap Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Konstruksi Di Kota Tomohon.” *JURNAL ILMIAH MEDIA ENGINEERING* 2(4): 219–31. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jime/article/view/4246/3775>.
- Purwanto, Erwan A. 2019. “Kajian Lintas Disiplin Atas Meninggal Dan Sakitnya Petugas Pemilu 2019.” *Riset Kajian Lintas Disiplin UGM*: 4–6. [https://www.kpu.go.id/koleksigambar/20190625\\_Prescon\\_Kajian\\_Lintas\\_Disiplin\\_atas\\_Meninggal\\_dan\\_Sakitnya\\_Petugas\\_pemilu\\_2019.pdf](https://www.kpu.go.id/koleksigambar/20190625_Prescon_Kajian_Lintas_Disiplin_atas_Meninggal_dan_Sakitnya_Petugas_pemilu_2019.pdf).
- Putri, Nora Eka. 2014. “Efektivitas penerapan jaminan kesehatan nasional melalui BPJS dalam pelayanan kesehatan masyarakat miskin di kota padang Nora Eka Putri.” *Jurnal ilmiah ilmu-ilmu sosial budaya dan ekonomi* 10(2): 175–89. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/tingkap/article/view/4421>.
- Rengganis, Sekar Asih. 2013. “analisis implementasi pemeriksaan kesehatan pada karyawan di bagian produksi pt. frisian flag indonesia tahun 2012.” universitas islam negeri syarif hidayatullah.
- Riyadi, Slamet. 2011. “Pengaruh Kompensasi Finansial , Gaya Kepemimpinan , Dan Motivasi Kerja.” *Jurnal Manajemen dan Kiwirausahaan* 13(1). <http://ced.petra.ac.id/index.php/man/article/view/18243>.
- Sapariah. 2015. “analisis pengaruh jenis kelamin terhadap kinerja karyawan bagian perawatan pada pt.mulia bhakti kahuripan.” universitas muhammadiyah pontianak. <http://repository.un>
- Solihah, Ratnia. 2019. “Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik.” 3(1): 73–88. [file:///D:/Peluang dan tantangan pemilu seentaK.pdf](file:///D:/Peluang%20dan%20tantangan%20pemilu%20seentaK.pdf).
- Wirawan, Ketut Edy Dkk. 2016. “Pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan.” *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen* 4(1): 1–9. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJM/article/view/>